



**BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2019**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Utara tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1993 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK/.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2107 Nomor 1884);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
3. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
4. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
5. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.

BAB II

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2019, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

- a. alokasi dasar;
- b. alokasi afirmasi; dan
- c. alokasi formula.

Pasal 3

Pagu Alokasi Dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a, dihitung sebesar 72% (tujuh puluh dua persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara merata kepada setiap desa.

Pasal 4

Pagu Alokasi Afirmasi setiap desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b, dihitung sebesar 3% (tiga persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara proporsional kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi.

Pasal 5

Pagu Alokasi Formula setiap desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c, dihitung sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa dengan bobot sebagai berikut :

- a. 10 % (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
- b. 50 % (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
- c. 15 % (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
- d. 25 % (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

Pasal 6

Penghitungan alokasi afirmasi bagi beberapa Desa yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak yang berada pada kelompok desa pada desil ke 8 (delapan), 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$AA \text{ Desa} = (0,03 \times DD) / \{(2 \times DST) + (1 \times DT)\}$$

Keterangan :

- AA Desa = Alokasi Afirmasi setiap Desa
DD = pagu Dana Desa nasional
DST = jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
DT = jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

Pasal 7

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$AF \text{ Kab} = [(0,10 \times Y1) + (0,50 \times Y2) + (0,15 \times Y3) + (0,25 \times Y4)] \times (0,20 \times DD_{\text{Kab}})$$

Keterangan :

- AF Kab = Alokasi Formula setiap kabupaten
Y1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa setiap kabupaten terhadap total penduduk Desa nasional
Y2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap kabupaten terhadap total penduduk miskin Desa nasional
Y3 = rasio luas wilayah Desa setiap kabupaten terhadap total luas wilayah Desa nasional
Y4 = rasio IKK kabupaten terhadap total IKK kabupaten yang memiliki Desa

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Barito Utara ini.

BAB III

PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap :
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh perseratus);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh perseratus).

- (4) Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan setelah :
 - a. kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa mengenai APB Desa kepada bupati; dan
 - b. kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi Dana Desa Akhir Tahun kepada bupati.
- (5) Peraturan Desa mengenai APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan b, disampaikan Kepala Desa kepada bupati paling lambat minggu kedua bulan Februari.
- (6) Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan setelah :
 - a. kepala Desa menyampaikan kepada Bupati laporan realisasi penyerapan dan capaian *Output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. kepala Desa menyampaikan kepada Bupati berupa Laporan Pertanggungjawaban/LPj penggunaan Dana Desa tahap I dan II tahun anggaran sebelumnya.
- (7) Penyaluran Dana Desa Tahap III dilakukan setelah kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian *Output* Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (8) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada bupati paling lambat minggu kedua bulan Oktober.

BAB IV

PELAPORAN DANA DESA

Pasal 10

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I, dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Tahap I paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - b. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun anggaran berjalan.

BAB V

SANKSI

Pasal 11

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal :
 - a. tidak terpenuhinya persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), ayat (5) ayat (6) dan ayat (7);
 - b. terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 2 Januari 2019


BUPATI BARITO UTARA,

NADALSYAH

Diundangkan di Muara Teweh
Pada tanggal 2 Januari 2019


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,

JAINAL ABIDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2019 NOMOR 3.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


FAKHRI FAUZI
NIP. 19710921 199803 1 004

LAMPIRAN :
 PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
 NOMOR 3 TAHUN 2019
 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
 RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BARITO
 UTARA TAHUN ANGGARAN 2019

**RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
 DI KABUPATEN BARITO UTARA
 TAHUN 2019**

No.	Kecamatan/ Desa	Jumlah Dana Desa (Rp.)	Pembagian Tahapan		
			Tahap I (20%) (Rp.)	Tahap II (40%) (Rp.)	Tahap III (40%) (Rp.)
1	2	3	4	5	6
I Kecamatan Teweh Tengah					
1	LEMO I	907.542,000	181.508,400	363.016,800	363.016,800
2	LEMO II	1.598.078,000	319.615,600	639.231,200	639.231,200
3	PENDREH	1.445.632,000	289.126,400	578.252,800	578.252,800
4	RIMBA SARI	905.950,000	181.190,000	362.380,000	362.380,000
5	SEI RAHAYU I	957.847,000	191.569,400	383.138,800	383.138,800
6	SEI RAHAYU II	845.316,000	169.063,200	338.126,400	338.126,400
7	BERINGIN RAYA	953.620,000	190.724,000	381.448,000	381.448,000
8	DATAI NIRUI	855.563,000	171.112,600	342.225,200	342.225,200
JUMLAH		8.469.548,000	1.693.909,600	3.387.819,200	3.387.819,200
II Kecamatan Teweh Baru					
1	LIANG NAGA	1.796.880,000	359.376,000	718.752,000	718.752,000
2	SABUH	1.395.079,000	279.015,800	558.031,600	558.031,600
3	HAJAK	1.472.618,000	294.523,600	589.047,200	589.047,200
4	MALAWAKEN	1.063.259,000	212.651,800	425.303,600	425.303,600
5	SIKUI	1.452.090,000	290.418,000	580.836,000	580.836,000
6	PANAEN	1.040.884,000	208.176,800	416.353,600	416.353,600
7	LIANG BUAH	933.596,000	186.719,200	373.438,400	373.438,400
8	GANDRING	1.040.884,000	208.176,800	416.353,600	416.353,600
JUMLAH		10.195.290,000	2.039.058,000	4.078.116,000	4.078.116,000
III Kecamatan Teweh Selatan					
1	TRAHEAN	911.284,000	182.256,800	364.513,600	364.513,600
2	TRINSING	989.089,000	197.817,800	395.635,600	395.635,600
3	BINTANG NINGGI I	876.498,000	175.299,600	350.599,200	350.599,200
4	BINTANG NINGGI II	865.478,000	173.095,600	346.191,200	346.191,200
5	BUTONG	1.022.942,000	204.588,400	409.176,800	409.176,800
6	BUNTOK BARU	914.196,000	182.839,200	365.678,400	365.678,400
7	BUKIT SAWIT	1.055.105,000	211.021,000	422.042,000	422.042,000
8	TAWAN JAYA	1.028.318,000	205.663,600	411.327,200	411.327,200
9	PANDRAN RAYA	922.443,000	184.488,600	368.977,200	368.977,200
10	PANDRAN PERMAI	861.217,000	172.243,400	344.486,800	344.486,800
JUMLAH		9.446.570,000	1.889.314,000	3.778.628,000	3.778.628,000
IV Kecamatan Labei					
1	IPU	954.773,000	190.954,600	381.909,200	381.909,200
2	MUKUT	996.031,000	199.206,200	398.412,400	398.412,400
3	MUARA BAKAH	868.194,000	173.638,800	347.277,600	347.277,600
4	JUJU BARU	897.384,000	179.476,800	358.953,600	358.953,600
5	MUARA INU	910.212,000	182.042,400	364.084,800	364.084,800

No.	Kecamatan/ Desa	Jumlah Dana Desa (Rp.)	Pembagian Tahapan		
			Tahap I (20%) (Rp.)	Tahap II (40%) (Rp.)	Tahap III (40%) (Rp.)
1	2	3	4	5	6
6	BENGAHON	869.475,000	173.895,000	347.790,000	347.790,000
7	RAHADEN	952.026,000	190.405,200	380.810,400	380.810,400
8	MUARA PARI	953.620,000	190.724,000	381.448,000	381.448,000
9	HARAGANDANG	953.831,000	190.766,200	381.532,400	381.532,400
10	KARENDAN	1.068.497,000	213.699,400	427.398,800	427.398,800
11	HURUNG ENEP	1.000.160,000	200.032,000	400.064,000	400.064,000
JUMLAH		10.424.203,000	2.084.840,600	4.169.681,200	4.169.681,200
V Kecamatan Lahei Barat					
1	NIHAN HILJR	1.362.804,000	272.560,800	545.121,600	545.121,600
2	NIHAN HULU	850.126,000	170.025,200	340.050,400	340.050,400
3	LUWE HILJR	931.380,000	186.276,000	372.552,000	372.552,000
4	LUWE HULU	954.744,000	190.948,800	381.897,600	381.897,600
5	JANGKANG BARU	933.596,000	186.719,200	373.438,400	373.438,400
6	JANGKANG LAMA	857.742,000	171.548,400	343.096,800	343.096,800
7	PAPAR PUJUNG	951.879,000	190.375,800	380.751,600	380.751,600
8	TELUK MALEWAI	933.670,000	186.734,000	373.468,000	373.468,000
9	BENAO HILJR	966.833,000	193.366,600	386.733,200	386.733,200
10	BENAO HULU	999.119,000	199.823,800	399.647,600	399.647,600
11	KARAMUAN	973.229,000	194.645,800	389.291,600	389.291,600
JUMLAH		10.715.122,000	2.143.024,400	4.286.048,800	4.286.048,800
VI Kecamatan Teweh Timur					
1	SAMPIRANG I	913.976,000	182.795,200	365.590,400	365.590,400
2	SAMPIRANG II	982.642,000	196.528,400	393.056,800	393.056,800
3	LLJU	891.298,000	178.259,600	356.519,200	356.519,200
4	BENANGIN III	867.688,000	173.537,600	347.075,200	347.075,200
5	BENANGIN II	926.311,000	185.262,200	370.524,400	370.524,400
6	BENANGIN V	906.371,000	181.274,200	362.548,400	362.548,400
7	BENANGIN I	954.557,000	190.911,400	381.822,800	381.822,800
8	MUARA WAKAT	859.494,000	171.898,800	343.797,600	343.797,600
9	MAMPUAK I	942.586,000	188.517,200	377.034,400	377.034,400
10	JAMUT	939.836,000	187.967,200	375.934,400	375.934,400
11	SEI LLJU	956.197,000	191.239,400	382.478,800	382.478,800
12	MAMPUAK II	966.094,000	193.218,800	386.437,600	386.437,600
JUMLAH		11.107.050,000	2.221.410,000	4.442.820,000	4.442.820,000
VII Kecamatan Gunung Timang					
1	MALUNGAI	820.356,000	164.071,200	328.142,400	328.142,400
2	RARAWA	826.097,000	165.219,400	330.438,800	330.438,800
3	KETAPANG	833.686,000	166.737,200	333.474,400	333.474,400
4	WALUR	897.203,000	179.440,600	358.881,200	358.881,200
5	BALITI	859.172,000	171.834,400	343.668,800	343.668,800
6	MAJANGKAN	858.904,000	171.780,800	343.561,600	343.561,600
7	KANDUI	1.223.616,000	244.723,200	489.446,400	489.446,400
8	PAYANG ARA	847.840,000	169.568,000	339.136,000	339.136,000
9	JAMAN	830.510,000	166.102,000	332.204,000	332.204,000
10	PELARI	842.418,000	168.483,600	336.967,200	336.967,200
11	SANGKORANG	849.710,000	169.942,000	339.884,000	339.884,000
12	SIWAU	852.664,000	170.532,800	341.065,600	341.065,600

No.	Kecamatan/ Desa	Jumlah Dana Desa (Rp.)	Pembagian Tahapan		
			Tahap I (20%) (Rp.)	Tahap II (40%) (Rp.)	Tahap III (40%) (Rp.)
1	2	3	4	5	6
13	TONGKA	949.871,000	189.974,200	379.948,400	379.948,400
14	BATU RAYA I	1.177.706,000	235.541,200	471.082,400	471.082,400
15	BATU RAYA II	951.524,000	190.304,800	380.609,600	380.609,600
16	TAPEN RAYA	817.176,000	163.435,200	326.870,400	326.870,400
JUMLAH		14.438.453,000	2.887.690,600	5.775.381,200	5.775.381,200
VIII Kecamatan Gunung Parei					
1	TANJUNG HARAPAN	817.966,000	163.593,200	327.186,400	327.186,400
2	LENON BESI I	814.204,000	162.840,800	325.681,600	325.681,600
3	LENON BESI II	789.737,000	157.947,400	315.894,800	315.894,800
4	MUARA MEA	845.900,000	169.180,000	338.360,000	338.360,000
5	LAWARANG	826.656,000	165.331,200	330.662,400	330.662,400
6	LAMPEONG I	828.586,000	165.717,200	331.434,400	331.434,400
7	LAMPEONG II	878.688,000	175.737,600	351.475,200	351.475,200
8	PAYANG	839.179,000	167.835,800	335.671,600	335.671,600
9	BERONG	836.074,000	167.214,800	334.429,600	334.429,600
10	BAOK	852.227,000	170.445,400	340.890,800	340.890,800
11	TAMBABA	833.942,000	166.788,400	333.576,800	333.576,800
JUMLAH		9.163.159,000	1.832.631,800	3.665.263,600	3.665.263,600
IX Kecamatan Montalhat					
1	SIKAN	1.729.801,000	345.960,200	691.920,400	691.920,400
2	RUBEI	879.746,000	175.949,200	351.898,400	351.898,400
3	PEPAS	958.994,000	191.798,800	383.597,600	383.597,600
4	RUJI	894.066,000	178.813,200	357.626,400	357.626,400
5	PARING LAHUNG	891.732,000	178.346,400	356.692,800	356.692,800
6	KAMAWEN	842.418,000	168.483,600	336.967,200	336.967,200
JUMLAH		6.196.757,000	1.239.351,400	2.478.702,800	2.478.702,800
TOTAL		90.156.152,000	18.031.230,400	36.062.460,800	36.062.460,800

